

## **Mepeed dan Wacana Ajeg Bali: Sukawati Pasca Bom Bali 2002**

**EKA NINGTYAS**

Mahasiswa Doktoral INALCO, Prancis  
Email: eka.ningtyasss@gmail.com

### **Abstract**

This article endeavors to explore *Ajeg* Bali with special emphasis on *mepeed* ritual in traditional village of Pakraman Sukawati in post-Bali Bombing 2002. Analysis on this study focuses on how *Ajeg* Bali as a discourse could prompt changes occurred in Balinese society and how they shape Balinese identity. Firstly, this study tracks the advent of *Ajeg* Bali discourse by comparing practices of cultural preservation by Dutch colonial and New Order regime under Soeharto. Secondly, this study also observes position of *Ajeg* Bali discourse and how it affects society's efforts to "protect" Bali. Thirdly, this article emphasizes on the *mepeed* ritual that transformed in Sukawati post-2002 especially in the spirit of *Ajeg* Bali. This study is a historical research that combines historical method and taking a cultural history point of view on explaining relation between *mepeed* and *Ajeg* Bali in Sukawati.

### **Keywords:**

*Ajeg* Bali;  
*mepeed*;  
Sukawati

### **Abstrak**

Artikel ini berusaha menjelaskan *Ajeg* Bali di pulau Bali, dengan secara khusus memberikan penekanan pada ritual *mepeed* di desa adat pakraman Sukawati pasca peristiwa bom Bali 2002. Analisis tulisan ini fokus pada bagaimana wacana *Ajeg* Bali mampu memberikan dorongan perubahan dalam masyarakat Bali dalam memandang dan merumuskan identitas ke-Bali-annya. Pertama, tulisan ini melacak kemunculan wacana *Ajeg* Bali dengan menariknya pada usaha preservasi budaya yang sama yang pernah dilakukan pada jaman kolonial Belanda dan Indonesia di bawah Soeharto. Kedua, tulisan ini juga melihat kedudukan wacana *Ajeg* Bali dalam masyarakat dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk "melindungi" Bali. Ketiga, tulisan ini menekankan pada ritual *mepeed* yang mengalami transformasi di Sukawati pasca 2002 terutama dalam semangat *Ajeg* Bali. Artikel ini merupakan artikel sejarah dengan menggunakan metode penulisan sejarah dan mengambil sudut pandang sejarah budaya dalam menjelaskan hubungan antara *mepeed* dan *Ajeg* Bali di Sukawati.

### **Kata Kunci:**

*Ajeg* Bali;  
*mepeed*;  
Sukawati

## Pendahuluan

*Ajeg* Bali menjadi sebuah ungkapan yang begitu sering terdengar di telinga baik secara lisan maupun dalam pemberitaan surat kabar lokal dan siaran stasiun televisi lokal ketika berkunjung ke Bali. *Ajeg* Bali seolah menjadi nilai yang dipegang dan dipertahankan oleh masyarakat Bali dalam menghadapi perubahan budaya, sosial dan politik di Bali. Lantas, apa sebenarnya makna dari istilah *ajeg* Bali itu sendiri? Bagaimana istilah *ajeg* Bali muncul dan menjadi sebuah nilai yang harus diikuti oleh seluruh warga Bali? Mengapa *ajeg* Bali hadir di tengah masyarakat Bali? Apa kaitannya *mepeed* dengan *Ajeg* Bali? Tulisan ini berusaha untuk melihat wacana *ajeg* Bali yang termanifestasi dalam ritual *mepeed* di desa adat pakraman Sukawati pasca peristiwa bom Bali 2002.

*Ajeg* Bali merupakan sebuah wacana mengenai posisi budaya Bali di Indonesia, secara khusus sejak reformasi dan otonomi daerah terjadi. Nordholt mengatakan bahwa *ajeg* Bali memiliki hubungan dengan upaya kekuatan di luar Bali untuk menentukan identitas Bali yang unik (Nordholt, 2007 : 389). *Ajeg* Bali secara harfiah memiliki arti menjaga Bali agar *ajeg* atau tetap, sederhananya menjaga Bali dari unsur-unsur yang dianggap mampu mengurangi kemurnian dan esensi dari budaya Bali itu sendiri. Turisme massal yang telah digagas pada awal tahun 1960an dan sejak tahun 1970an fokus pada ujung selatan Bali, membawa pada sebuah kenyataan bahwa pariwisata menjadi bagian dari budaya masyarakat Bali<sup>1</sup>. Selain itu perkembangan infrastruktur ikut berkembang dalam tujuan untuk mendukung turisme-massa yang dikembangkan di Bali (Picard, 2006: 56). Pada tahun 1964 tercatat beberapa usaha yang telah dilakukan antara lain membangun banda di dekat Den Passar, pembangunan hotel berlantai empat yang mampu menampung ratusan tamu<sup>2</sup>. Bali sibuk memodernisasi jalan-jalan tua yang mengarah ke pura Hindu agar layak bagi turisme.

Diskusi yang muncul mengenai *ajeg* Bali justru menunjukkan sisi ambiguitas Bali dalam menghadapi pembentukan identitas budaya “ke-Bali-an” itu sendiri. Turisme Bali sejak awal dibentuk dengan menekankan gagasan pariwisata budaya yang tidak hanya mengkodifikasi budaya namun juga membentuk turistifikasi masyarakat. Hal ini mengalami puncak terutama pada 1970an hingga 1980an yang termaktub pada program-program Repelita untuk mencapai target pembangunan turisme Nasional, melalui turisme-massa di Bali. Ini kemudian mengaburkan batasan imajiner antara budaya dan pariwisata di Bali. Dilema yang dihadapi adalah, Bali ingin memaksimalkan keuntungan ekonomi melalui pariwisata namun disisi lain

---

1) “Balinezen wachten gelaten het Massatoerisme af”, *De Telegraaf*, 4 April 1970. “Schaduw van Massatoerisme hangt over eiland Bali”, *Nieuwsblad van het Noorden*, 17 December 1976.

2) “Massatoerisme op Bali verwacht”, *De Telegraaf*, 8 September 1964.

tidak menginginkan Budaya Bali “rusak” oleh persinggungan budaya yang dibawa para turis maupun pendatang lainnya. Ambiguitas ini terus bergulir bagaikan bola panas dan kemudian menjadikan peristiwa bom Bali tahun 2002 sebagai *cassus belli* untuk memikir ulang usaha preservasi budaya Bali agar “tetap” atau *ajeg*.

Masalah identitas budaya terus bergulir di Bali. Kemunculan pendatang dari luar Bali dianggap mengancam “eksistensi” masyarakat Bali itu sendiri (Richard Fox, 2013 :57). Tentu saja konsekuensi logis yang dihadapi ketika menjadi daerah tujuan wisata nomer satu di Indonesia, Bali akan bersinggungan secara sosial, budaya maupun agama dengan turis maupun pendatang dari luar Bali yang ingin ikut memperebutkan potongan “kue” pariwisata. Jika pada dekade 1970an, masyarakat Bali bisa mengkambinghitamkan turis Hippies yang datang ke Bali khususnya di sepanjang pantai selatan Bali seperti Kuta, namun untuk dekade 1990an hingga 2000an tentu saja hal ini akan sulit<sup>3</sup>. Pendatang dari luar Bali dianggap menjadi salah satu faktor pendukung menurunkan kualitas kebudayaan Bali. Gesekan sosial kerap terjadi diperparah dengan peristiwa bom Bali yang seolah menyulut bara api rivalitas antara “*nak Jawa*” atau pendatang yang mayoritas Muslim dan juga masyarakat Bali yang Hindu. Sehingga *ajeg* Bali menjadi sebuah formulasi atas masalah sosial yang terjadi ini.

*Ajeg* Bali bukan sebuah konsep yang baru di Bali. *Ajeg* Bali merupakan kepanjangan tangan dari usaha “kolonisasi Bali” melalui *Baliseering* pada masa kolonialisme yang diteruskan oleh Orde Baru (Ngurah Suryawan, 2013 : 114). Sejak awal citra Bali telah dibentuk sebagai daya tarik untuk kepentingan industri pariwisata. Nordholt lebih lanjut mengatakan bahwa setelah 1930an citra Bali yang muncul sebagai tempat istimewa yang tepat bagi orang asing yang dipengaruhi ide-ide romantisme surga di Timur (*orient*).

### **Sederet Usaha Membentuk Citra Bali: Dari *Baliserring*, Bali Lestari hingga *Ajeg* Bali**

Citra Bali yang buas, liar dan penuh perang sampai titik darah terakhir (*puputan*) seolah sengaja dihilangkan. Bali justru menjadi sinonim keindahan, sensualitas, bakat seni, dan unsur-unsur budaya yang eksotik (Henk Schulte Nordholt, 2002: 186). Citra Bali eksotik yang oleh Vickers disebut sebagai “Sorga Dunia” diberitakan kepada dunia salah satunya melalui buku Miguel Covarrubias yang berjudul *Island of Bali* terbit pada 1937. Lukisan di dalam *Island of Bali* menjadi lukisan standar tentang Bali dan menjadi daya tarik semakin besar jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali (Adrian Vickers, 1989: 114-117).

Usaha-usaha untuk menjaga “kelestarian Bali” menjadi diskusi publik

---

3) Eka Ningtyas, “Dari Ekspatriat Barat Sampai Hippies: Pariwisata Bali 1920-1970an” *Tesis S2 Pascasarjana Ilmu Sejarah*, Universitas Gadjah Mada, 2016, hlm. 67-69

yang menarik untuk disimak. Dalam *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië* menyebutkan bahwa Aneta (*Algemeen Nieuws en Telegraaf Agent Schap*) sebagai kantor berita pertama di Indonesia yang didirikan di Batavia pada tahun 1917, menuntut perlindungan Bali sebagai *Indisch natuur monument* atau Bali sebagai monumen alam hindia<sup>4</sup>. Kemudian mulai dirumuskan bagaimana cara menjaga Bali dan penduduknya agar tetap alami. Pada tahun 1929 A. Morzer Bruyns salah satu pengurus dari *Vereeniging voor Toeristenverkeer*<sup>5</sup> di Singaraja meminta kepada redaksi *Soerabaiasch Handelsblad* untuk merevisi artikelnya yang berjudul “reizend occasional” dengan menambahkan beberapa fakta. Dalam “reizend occasional” yang dimuat pada 22 Januari 1929 dikatakan bahwa pada 1928 Bali dikunjungi oleh 1500 wisatawan<sup>6</sup>. Padahal menurut *Vereeniging voor Toeristenverkeer* jumlahnya hanya 900 wisatawan, sedangkan pada 1929 Bali dikunjungi oleh 1500 wisatawan, bukan 5000 wisatawan<sup>7</sup>.

Tentu saja jumlah kunjungan wisatawan ke Bali mengalami penurunan ketika krisis terjadi. Krisis Malaise turut menyumbang penurunan pembelian produk seni Bali pada tahun 1932<sup>8</sup>. Namun angka statistik pariwisata justru menunjukkan angka 218 wisatawan pada awal April 1933 sekaligus menandai peningkatan sebesar 102 wisatawan pada April 1932 yang hanya berada diangka 116<sup>9</sup>. Angka-angka total menunjukkan jumlah yang lebih menguntungkan yaitu pada angka 719 pada bulan Januari hingga April tahun 1933 sedangkan untuk Januari hingga April 1932 hanya berjumlah 549 wisatawan.

Pemerintah kolonial telah memikirkan sebuah cara bagaimana menjaga dan melestarikan kebudayaan Bali yang dianggap merupakan warisan dari kebudayaan hindu Majapahit sebelum kedatangan Islam. *Baliseering* merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dimulai sejak tahun 1939 untuk menjaga Bali tetap “alami”, tentu saja “alami” menurut tolak ukur pandangan yang dipengaruhi oleh ide-ide eksotisme timur. Untuk menjaga Bali tetap “alami”, kegiatan misi dan zending tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Dalam laporan seorang penasehat-zending yang mendapat mandate dari Nederland Bijbel Genootschap untuk mengkaji Bali yaitu Dr. Kremer mengatakan bahwa Bali

---

4) “Bali ‘natuur-monument’”, *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 23 Juli 1927.

5) *Vereeniging Toeristenverkeer* merupakan perhimpunan turisme yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Heutsz pada tahun 1908. Tujuan perhimpunan ini adalah untuk mengembangkan dan mendorong turisme di Hinda Belanda. Lihat: Achmad Sunjayadi, *Vereeniging toeristen verkeer Batavia (1908-1942): Awal Turisme Modern di Hindia Belanda*, (Depok: FIB UI, 2007). Hlm 67.

6) “Reizend Occasional”, *Soerabaiasch Handelsblad*, 22 Januari 1929.

7) “Bali Toerisme”, *Soerabaiasch Handelsblad*. 1 Febuari 1929

8) “Toerisme op Bali”, *De Telegraaf*, 21 Maart 1932.

9) “Het Toerisme 1933 Geen Kwaad Figuur”, *Bataviaasch Nieuwsblad*, 18 Mei 1933.

siap untuk dilakukan kegiatan zending<sup>10</sup>. Dr. K.J. Brouwer selaku Zending-director mengatakan bahwa *Utrechtse Zending Vereeniging* telah bekerja di Bali sejak 1864 hingga 1881<sup>11</sup>. Namun kegiatan ini harus terhenti karena tidak mendapat izin dari pemerintah kolonial Belanda. Menurut Brouwer *art. 177. Ind. Staatsreg* menjadi landasan kegiatan pewartaan agama di Bali harus dihentikan dan dilarang. Pemerintah Belanda mendukung upaya Bali agar tetap ‘alami’ melalui agama Hindu.

*ja, men kan een stap verder gaan en zeggen dat het zeker niet zonder invloed is van de zijde der bevorderaars van het toerisme als men het Christendom buiten het z.g. Hindoe reservaat wil houden, want als te Baliers christelijke gewoonten ook in hun kleding zouden gaan aannemen, zou er zeker meer dan een der het toerisme bevorderende aantrekkelikheden verdwijnen<sup>12</sup>.*

Sebuah masalah muncul ketika usaha menjaga Bali tetap “alami” ini “rusak” oleh pendudukan Jepang. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Belanda terhadap pengaruh Jepang pada pendidikan di Bali telah membawa pada hasil yang tidak menyenangkan pihak Belanda<sup>13</sup>. Dalam laporan penyelidikan itu dikatakan bahwa Jepang sengaja menghilangkan apa yang disebut “baliseering” pendidikan yang telah dimulai pada tahun 1939 di Bali. Menurut pendapat Jepang yang mendapat dukungan dari kaum nasionalis Jawa, reformasi pendidikan perlu dilakukan karena Belanda dianggap sengaja membentuk masyarakat Bali dan budaya Bali agar sesuai dengan kemauan Belanda.

Pandangan ini membawa konsekuensi logis bahwa selama pendudukan Jepang di Bali terdapat banyak perubahan seperti dihilangkannya gerakan senam yang memiliki unsur-unsur dari tarian klasik, tidak ada permainan anak-anak tradisional, lagu-lagu lama Bali yang telah diinventarisasi dengan susah payah oleh Belanda harus lenyap, dan juga dekorasi dinding Balian yang indah dalam jumlah besar menjadi tidak terawat<sup>14</sup>. Selama masa pendudukan Jepang, ada usaha yang massif untuk menghilangkan pengaruh “Baliseering” yang diprakarsai oleh Belanda.

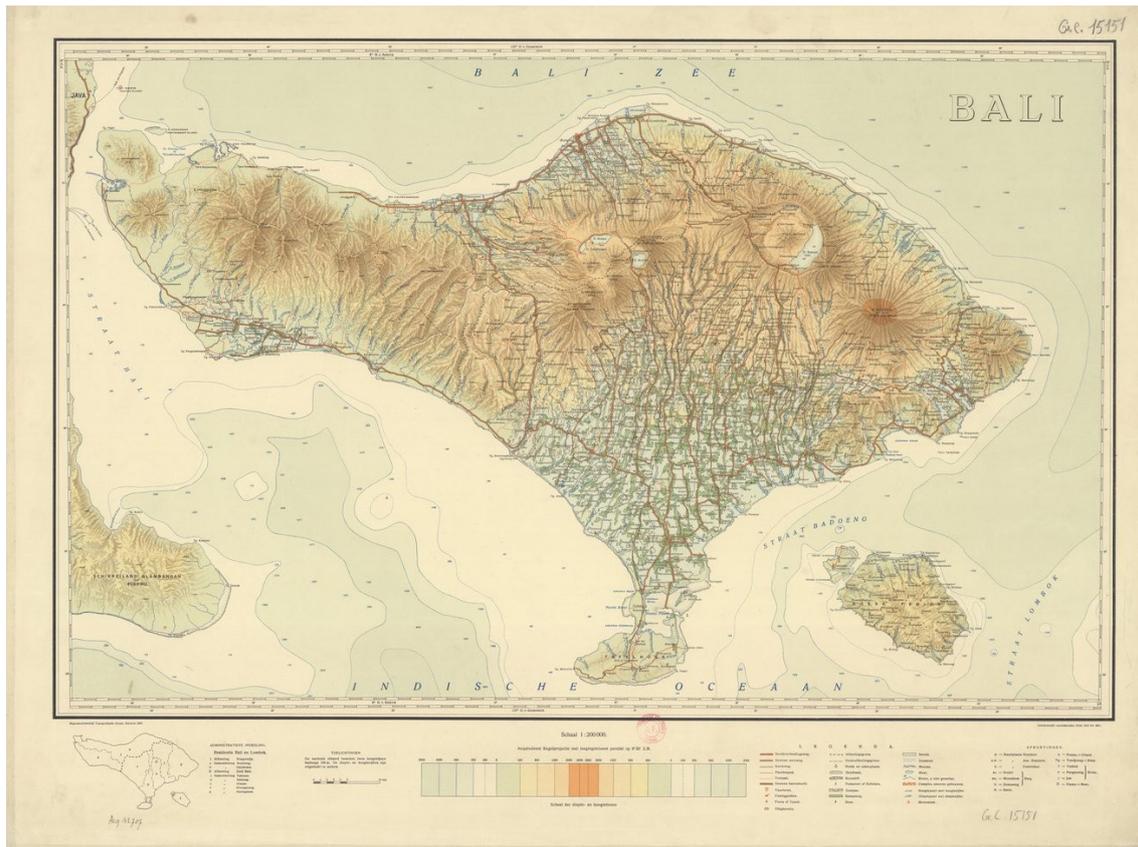
10) “Kerknieuws, Bali Rijk voor de Zending?”, *Algemeen Handelsblad*, 27 Mei 1932

11) “Het Zending-Probleem op Bali” *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*. 23-09-1932

12) ya, kita bisa melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa itu pasti berkaitan dengan promosi pariwisata jika seseorang ingin menjaga kekristenan tetap berada di luar (Bali) atau disebut: reservasi Hindu, karena jika orang Bali harus mengadopsi kebiasaan Kristen dalam pakaian mereka juga, lebih dari satu atraksi wisata yang memikat tentu akan hilang. Dalam “Het Zending-Probleem op Bali” *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*. 23-09-1932

13) “Het Onderwijs op Bali Afbraak door den Jap”, *Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia*, 15 Mei 1946.

14) “Het Onderwijs op Bali Afbraak door den Jap”, *Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia*, 15 Mei 1946.



Figur 1. Peta Bali tahun 1935. Sumber: gallica.bnf.fr

Bali menjadi primadona yang terus memerlukan polesan dan penjagaan yang sifatnya berasal dari negara. Melalui program “Bali Lestari”, pemerintah Orde Baru meneruskan apa yang telah dikonstruksikan oleh kolonialisme Belanda, yang sama-sama melihat kebudayaan Bali sebagai “gadis cilik yang molek” yang lemah, lembut tak berdaya. Bali sebagai *dara bajang* yang harus dijaga dan dilindungi oleh bapak-bapak yang arif dan bijaksana dari pengaruh asing yang merusaknya.<sup>15</sup> Akan tetapi, pasca lengsernya Orde Baru, wacana politik kebudayaan bergeser dari citra perempuan cantik menjadi laki-laki berotot dan bertubuh kekar, dengan semboyan *Nindihin Bali*, yang siap menjaga Bali dari ancaman pihak-pihak luar yang akan merusak dan merongrong kebudayaan Bali.

### Kemunculan Wacana Ajeg Bali

Kemunculan wacana *Ajeg Bali* tidak lepas dari peristiwa bom Bali di Legian 12 Oktober 2002, dimana peristiwa itu menjadi momentum besar dan sebagai titik awal menggeliatnya berbagai wacana stabilitas serta keamanan

15) Mengutip Degung Santikarma, *Kompas*, 6 November 2002, dalam Nengah Bawa Atmadja, *Ajeg Bali, Gerakan, Identitas Kultural dan Globalisasi: Gerakan Identitas Kultural dan Modernisasi*, (LKIS: Yogyakarta, 2010) hlm. ix.



**Figur 2.** Pertunjukkan tari legong di Hotel Bali yang ditujukan kepada wisatawan. Sumber: De vrije pers/ ochtendbulletin 06-09-1949.



**Figur 3.** Tarian dalam menyambut wisatawan asing. Sumber: Nieuwsblad van het Noorden 17-12-1976.

Bali. Nordholt lebih jauh mengatakan bahwa kampanye *Ajeg Bali* tidak bisa lepas dari nama Satria Narada anak dari Ketut Narada pendiri dari *Bali Post* yang semula bernama Suara Indonesia pada 1948, yang sejak Mei 2002 sudah mendeklarasikan kampanye *Ajeg Bali* (Nordholt, 2007: 410). Pada tahun 1966, berdasarkan ketentuan pemerintah bahwa semua penerbitan harus berafiliasi kepada organisasi parpol dan instansi yang ada, nama *Suara Indonesia* diubah menjadi *Suluh Marhaen* edisi Bali, kemudian pada bulan Juni 1966 sampai Mei 1977 nama *Suluh Marhaen* diganti menjadi *Bali Post*<sup>16</sup>.

Dinasti ekonomi Ketut Narada melahirkan Bali TV, televisi lokal Bali yang dikelola oleh TP Bali Naradha Televisi pada 26 Mei 2002 dengan Satria Narada sebagai Direktur Utama. (Ngurah Suryawan, 2013 : 145). Dalam wawancaranya dengan Satria Naradha, Nordholt mengatakan bahwa :

Satria Narada mengklaim bahwa mendapatkan inspirasi mengenai *Ajeg Bali* pada tahun 1980an ketika masih menjadi siswa di Sekolah Menengah Atas. Dia menerima ide mengenai *Ajeg Bali* namun belum menemukan formulasi nama yang tepat. Kemudian pada tahun 1990an Satria Narada melihat sebuah billboard besar yang memobilisasi masyarakat Bali untuk “menjaga Bali”, dari situ Satria Narada tahu apa yang seharusnya dilakukan.

16) *Bali Post* merupakan salah satu surat kabar independen pertama di Indonesia, yang dimulai sejak 1948 sebagai *Suara Indonesia*. Ideologi surat kabar ini sangat dengan dengan PNI dan PDI(P)

*Ajeg* Bali secara resmi diperkenalkan pada pembukaan Bali TV pada bulan Mei 2002, ketika gubernur Bali, I Dewa Made Berata mengajak penonton untuk *mengajegkan adat* dan budaya Bali. Namun makna *ajeg* Bali menjadi sangat cair yang memiliki tendensi politis yang besar. Menurut Degung Santikarma terminologi *ajeg* Bali berasal dari bahasa Bali biasa yang mempunyai arti “kokoh, tegak, tegar, kekal, kencang, kuat dan stabil”. *Ajeg* Bali semakin massif menggema hingga seluruh penjuru Bali melalui pemberitaan yang diberitakan oleh Kelompok Media Bali Post, terutama pasca peristiwa ledakan bom Bali pada 12 Oktober 2002 (Waren: 2012, 300). Hal ini terjadi sebagai puncak dari kontestasi yang telah terjadi antara masyarakat Bali dengan *Nak Jawa* (pendatang), terutama dalam bidang ekonomi sosial dan budaya<sup>17</sup>.

Kegelisahan terjadi terutama karena merasa terancam akan menjadi asing di negeri sendiri itu memuncak setelah ledakan bom Bali pertama. Hal ini kemudian disambut dengan pemberitaan yang massif dari media *Bali Post*, kemudian mengerucutlah sebuah wacana yang melatarbelakangi tekad untuk melindungi diri dari “teroris”, para pendatang yang merusak Bali dengan meledakkan bom. Lantas hal itu memunculkan bibit-bibit sentimen etnis, kewaspadaan, *sweeping* dilakukan oleh *pecalang*<sup>18</sup> yang menjadi elemen penting dalam wacana *Ajeg* Bali. *Ajeg* Bali seakan mengawasi gerak-gerik setiap warga masyarakat Bali untuk berperan aktif dan turut serta dalam “menjaga” Bali. Nordholt mengatakan bahwa *pecalang* telah dimulai sejak tahun 1996 dan 1997 sebagai polisi desa di Sanur dan Kuta (Nordholt: 2007, 401). Terkadang *Ajeg* Bali menjadi pembenaran atas “kekerasan” yang dihasilkan dari aktivitas *pecalang* “menjaga” Bali. *Ajeg* Bali sebagai rezim kebenaran menghasilkan oposisi biner antara benar dan salah dan telah mengarahkan cara masyarakat Bali bertindak, tanpa sadar apa yang sudah dilakukan itu telah dikontrol.

*Ajeg* Bali menjadi obrolan tidak hanya di ranah politik namun juga obrolan di warung kopi, di *jaba pura* tempat berkumpulnya *taruna* (pemuda) untuk *metajen* (sabung ayam). Akan tetapi konsep *ajeg* Bali yang membingungkan terkadang justru berpotensi besar menciptakan gerakan

---

17) Masyarakat Bali menyematkan sebutan *Nak Jawa* kepada pendatang. Jawa yang dimaksud bukanlah hanya pendatang dari pulau Jawa semata, namun istilah yang digunakan untuk menyebut semua pendatang yang bukan berasal dari Bali.

18) *Pecalang* adalah sekelompok warga Bali yang berpakaian adat Bali dengan pakaian gelap dominan hitam, destar, kain kamen dililiti oleh kain *boleng* (kotak-kotak hitam-putih), dilengkapi dengan rompi dan *walkie-talkie*, yang awal kemunculannya berkaitan dengan pengamanan kampanye PDIP pada 1998 yang sukses memenangkan pemilu pada 1999 dengan perolehan suara Golkar dari 93,5% menjadi 10% suara sedangkan PDIP naik dari 3,5% hingga hampir 80%. Kemenangan PDIP merupakan bentuk manifestasi dari ekspresi etnisitas Bali yang sentimen anti-Jawa dan anti-Muslim. Semenjak itu *pecalang* menjadi satuan penjaga keamanan pada setiap kampanye PDIP dan terus mengepakkan sayap menjadi penjaga keamanan konser, upacara adat bahkan keamanan di Pasar. *Pecalang* ikut meramaikan wacana *ajeg* Bali karena dianggap sesuatu yang asli Bali dengan ciri kebalian yang kental. (disarikan dari berbagai bacaan)

fundamentalis Hindu di Bali. Dimana jika *ajeg* Bali maka akan juga menjadi *ajeg* Hindu, karena apa yang sebenarnya harus di *ajegkan* itu sendiri erat kaitannya dengan budaya Bali yang menempel pada agama Hindu sebagai sistem kepercayaan mayoritas masyarakat di Bali. Pertanyaan sederhana yang perlu dijawab adalah “apa sebenarnya yang harus di *ajegkan* di Bali?, mengapa harus mengkonstruksikan sebuah identitas kebudayaan melalui wacana *ajeg* Bali?, apakah benar apa yang diidealkan dalam wacana *ajeg* Bali memang benar-benar asli atau hanya kepanjangan tangan dari *Baliserring* atau Balinisasi yang dilakukan pemerintah kolonial?”. Dari pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bagaimana budaya menjadi sebuah bangunan yang kokoh, statis, linier dan homogenous, padahal sebenarnya budaya merupakan sesuatu yang *fluid*, hasil dari negosiasi yang terjadi dari setiap persinggungan kebudayaan.

### **Wacana *Ajeg* Bali, Bom Bali dan Eksistensi Ekonomi Pasar Seni Sukawati**

Santikarma mengungkapkan salah satu prespektif dalam melihat Bali adalah sebagai sebuah dekonstruksi, (Bali) sebagai bangunan yang harus terus dibongkar jika tidak ingin beku, statis dan mati. (Degung Santikarma, *Nusa Tenggara*, 22 Oktober 1994). Karena dari kesadaran dekonstruksi itulah Bali selayaknya dipahami sebagai sebuah konstruksi dari campur tangan kekuasaan yang membentuknya. Lebih lanjut Ngurah Suryawan mengatakan bahwa ketakutan ancaman dari *nak Jawa* menjadi latarbelakang penggugatan identitas dan sentiment ke-bali-an dari masyarakat Hindu Bali semakin terlihat jelas (Ngurah Suryawan, 2013 : 148). Gerakan ini mengatasnamakan agama Hindu Bali untuk membentengi kebudayaan Bali dari pengaruh luar yang berpotensi untuk menghancurkan kebudayaan Bali. Gerakan ini bernama gerakan *ajeg* Bali dan *ajeg* Hindu, yang berarti gerakan untuk menguatkan, *mengokohkan*, dan membentengi kebudayaan Bali yang berdasarkan agama Hindu dari ancaman pengaruh luar yang dibawa oleh pendatang. Gerakan penguatan kebudayaan ini diluncurkan pertama kali oleh pimpinan sebuah industri media terbesar dan berpengaruh yaitu Kelompok Media Bali Post.

Menurut Ngurah Suryawan, salah satu tujuan dari gerakan ini adalah penguatan ekonomi masyarakat Hindu Bali yang selama ini kalah saing dalam kontestasi ekonomi dengan para pendatang. Maka muncul program Koperasi Krama Bali (KKB)<sup>19</sup> dari kelompok media Bali Post yang berusaha membuka warung dan bersaing dengan pedagang yang sebegini besar berasal dari luar Bali. Selain memberikan pinjaman modal KKB juga memberikan pelatihan membuat soto, sate dan bakso *ajeg* Bali yang khas KKB untuk dapat bersaing dengan pedagang dari luar Bali. Mereka yang bergabung dengan KKB disetiap usahanya akan diberikan spanduk bertuliskan “Binaan Koperasi Krama Bali”,

---

19) Krama adalah masyarakat desa adat yang memeluk agama Hindu

dan jika beruntung akan dimuat sebagai promosi di Harian Bali Post. (Nguhah Suryawan, 2013 : 149).

Perasaan terancam yang dialami masyarakat Bali akibat pengaruh yang datang dari luar Bali inilah yang melatar-belakangi adanya beberapa acara seperti *talk show* di Bali TV (disponsori Toyota) yang dibawakan oleh Ida Pedanda Made Gunung, yang membicarakan mengenai topik agama dan implikasi moralnya. Dia adalah pembawa acara yang jenaka sehingga mampu membuat penontonnya tertawa terhadap pesan-pesan yang disampaikannya. Dalam hal ini dia kurang senang dengan banyaknya para pendatang yang masuk ke Bali. Melalui pesan yang cukup jelas : “banyak orang Bali menjual tanah mereka untuk membeli *sate*, tapi ingat bahwa banyak pendatang yang menjual *sate* untuk membeli tanah di Bali”. (Henk Schulte Nordholt, 2007 : 412).

Sedikit berbeda dengan Nordholt dan Suryawan, Richard Fox dalam penelitian lapangan yang dilakukan selama 10 bulan di Bali, hanya sedikit masyarakat yang mampu menyampaikan kasus di antara “Bali” dan “Bukan Bali” secara spesifik. Bagaimanapun, tidak sedikit yang justru menekankan pada dampak ekonomi dan konsekuensi lingkungan akibat dari turisme-massa yang diprakarsai oleh negara (Richard Fox: 2013, 57). Thomas Reuters berargumen bahwa *Ajeg Bali* tidak hanya berasal dari permasalahan “Bali” dan “Bukan Bali”. *Ajeg Bali* menunjukkan kompleksitas ketika muncul rasa kehilangan dan keinginan untuk pemberdayaan diri di kalangan orang Bali. Berbagai faktor yang melatarbelakanginya antara lain liberalisasi dan desentralisasi politik, meningkatnya ketergantungan pada ekonomi global, terorisme dan ketakutan pada islamisasi Bali (Thomas Reuter: 2009, 867)

Pesan-pesan penguatan kebudayaan Bali dalam wacana *ajeg Bali* semakin menguat semenjak peristiwa bom Bali pertama pada 12 Oktober 2002 di Legian. Masyarakat Bali seolah serempak menyetujui untuk memberantas ‘terorisme’ yang identik dengan Islam dan *nak Jawa*. Para pendatang yang mencari peruntungan dari industri pariwisata di Bali dengan berjualan bakso, *sate*, mie ayam mayoritas muslim dan secara serampangan diasosiasikan dengan ‘terorisme’ yang harus disingkirkan dari Bali. Salah satu cara halus yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat yang mensponsori pelatihan pecalang, hansip adalah dengan *sweeping*. Para pendatang ini juga mendapat tekanan lisan dari warga setempat maupun pemuda.

Untuk kasus daerah desa Adat Sukawati dengan pasar seninya yang menjadi pusat perekonomian masyarakat disana, dari data yang dikumpulkan dilapangan sejak Januari hingga Juli 2013 menarik untuk dilihat. Masyarakat desa adat pakraman Sukawati yang sebagian besar memiliki usaha jual-beli cinderamata ini, biasanya memiliki tamu-tamu yang selalu rutin berkunjung untuk membeli cinderamata dalam jumlah cukup besar. Hampir semua *art shop* di Bali memiliki satu atau dua tamu warga asing yang ikut tinggal lama

di rumah mereka, dengan pulang membawa cinderamata dalam jumlah besar untuk kemudian dijual lagi ke negara asalnya.<sup>20</sup>

Menurut Made Ringin, seorang pedagang di pasar seni Sukawati mengatakan, peristiwa bom Bali pertama pada 2002 tidak membawa dampak yang signifikan dalam perekonomian di pasar seni Sukawati. Walau jumlah tamu yang menginap di rumah berkurang dan jumlah pesanan juga berkurang, namun kondisi masih bisa dikatakan stabil. Masyarakat belum memiliki sentimen yang kuat terhadap para pendatang maupun warga muslim di Sukawati. Tepat pascaperistiwa bom Bali kedua pada tahun 2005-lah jadi titik penting terhadap respon yang dimunculkan warga desa adat pakraman Sukawati terhadap pendatang. Perekonomian menurun drastis, sampai-sampai banyak pedagang cinderamata di pasar seni Sukawati yang harus terlilit hutang besar karena banyak tamu yang membatalkan pesannya secara sepihak, padahal sebagian besar pedagang di pasar seni Sukawati hanyalah *reseller* yang mengambil dagangan dari *supplier*.

Perasaan terancam dan bibit ketidaknyamanan yang sebenarnya sudah ada walaupun masih dapat ditekan pada peristiwa bom Bali pertama, seakan tumpah pada peristiwa bom Bali kedua. Dalam wawancara dengan *Bendesa* Nyoman Pudja Antara yang tinggal di *banjar* Dlodtangluk, Sukawati, mengatakan bahwa perlakuan diskriminasi dan kekerasan terjadi di *banjar* Bedil dan *tempekan* pemecutan di *banjar* Tebuana, desa adat Pakraman Sukawati, antara bulan September-Oktober 2005, yang ditujukan kepada rumah kos *nak Jawa* yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang di pasar Senggol Sukawati<sup>21</sup>. Para pedagang ini terkena *sweeping* yang dilakukan oleh *pecalang* maupun umpatan lisan dan pemerasan yang didapat dari warga setempat.

Situasi di Ubud hampir sama dengan kasus di Sukawati, peristiwa pemerasan dan *sweeping* terhadap pedagang bakso juga terjadi. Bahkan hingga hari ini, warga Ubud memiliki peraturan yang ketat yang mengatur perijinan warga pendatang yang akan tinggal di Ubud. Kebanyakan para pendatang yang berprofesi sebagai pedagang bakso, sate maupun mie ayam dengan gerobak, tinggal di rumah kos yang berada disekitar desa adat Ubud, karena ketatnya peraturan desa disana.

Jika Ngurah Suryawan mengatakan bahwa keinginan untuk melawan terorisme yang muncul pasca bom Bali pertama dan kedua (lain daerah lain pula kadar dan bentuk resistensinya), untuk menyingkirkan *nak Jawa* dari masyarakat Hindu Bali diekspresikan melalui aksi terorisme gaya baru melalui

---

20) Wawancara dengan Made Ringin pemilik UD Puri's yang terletak di Jalan Raya Sukawati nomer 75. 13 Juli 2013 pukul 17.20 WITA

21) Pasar Senggol adalah istilah yang digunakan masyarakat Bali untuk menyebut pusat kuliner yang biasanya terdapat di latar depan pasar umum (pagi), yang berubah wujud menjadi pasar makanan pada malam hari. Sebagian besar pedagang di pasar Senggol adalah *nak Jawa*.

*sweeping* penduduk, konservasi dan mengokohkan budaya Bali (Ngruh Suryawan, 2013 : 153). Terorisme sebagai cermin fundamentalisme yang identik dengan Islam (pasca peristiwa Bom Bali) kini menemukan konteks dan makna baru di Bali, yaitu “terorisme budaya” dalam bentuk *ajeg* Bali dan *ajeg* Hindu. (Media Hindu, *Ajeg Bali Proteksi Agama, Budaya dan Tanah Bali*, edisi 21 November 2005). Nordholt justru lebih menekankan pada hubungan antara *Bali Post* sebagai media yang memainkan peranan penting di Bali dan kampanye *Aeg* Bali (Nordholt: 2007, 413).

### **Sekularisasi *mepeed*: Ritual atau Pertunjukkan?**

*Mepeed* adalah sebuah ritual keagamaan Hindu yang dilaksanakan saat upacara piodalan<sup>22</sup>, terutama dalam mendak Tirta, yaitu ritual pengambilan air di sumber mata air suci untuk dibawa ke pura. Untuk desa adat pakraman Sukawati, *mepeed* yang dilaksanakan satu tahun sekali yang diikuti oleh anggota 14 *banjar* adat dengan pelaksanaan pengambilan air suci di sumber air yang ada di pura Beji, Sukawati. *Mepeed* ini dibagi menjadi dua yaitu *mepeed spen* dan *mepeed nadi*. Biasanya *mepeed spen* dilaksanakan satu hari dengan ritual pengambilan air di sumber mata air yang dianggap suci dibawa dengan arak-arakan perempuan membawa kendi tempat menaruh air suci dan biasanya dilaksanakan 216 hari dalam penanggalan Jawa. sedangkan *mepeed nadi* di Sukawati dilaksanakan setahun sekali dalam penanggalan Jawa dengan jangka waktu tiga hingga empat hari. Hal ini dikarenakan dalam *mepeed nadi* ada ritual mengeluarkan *pratima* yang ada di pura untuk kemudian dibersihkan dan juga pengambilan air suci di sumber mata air di pura Beji<sup>23</sup>.

Perlu diketahui ritual *mepeed* untuk setiap daerah di Bali memiliki kekhasannya masing-masing, untuk daerah di Badung biasanya *mepeed gebongan* (sesaji yang berisi buah yang diletakkan di kepala), sedangkan di Sukawati, *mepeed* tidak pernah menggunakan gebongan, hanya arak-arakan perempuan yang membawa kendi berisikan air tirta. Lantas apa kaitannya *ajeg* Bali dengan ritual *mepeed* di desa adat Pakraman Sukawati?

*Mepeed* di Sukawati merupakan *mepeed* dengan pakaian adat *lelengisan* yaitu kain putih kuning dengan memakai *kancut* (kain yang menjuntai diantara sela-sela kaki, yang dililitkan pada pinggang). Sedangkan di daerah lain menggunakan pakaian adat *lelunakan* yaitu kain dengan warna hitam dan tidak menggunakan *kancut*. Menjadi paradoks adalah ketika bagian yang sakral dari ritual *mepeed* adalah barisan perempuan dengan berpakaian kebaya dominan putih membawa kendi tempat air suci, dicampur dengan para pengiring yang berdandan pakaian adat *lelengisan* (walaupun yang *mepeed* juga disebut *ngiring* dalam istilah Bali). Para pengiring ini berdandan

22) Upacara memperingati berdirinya sebuah pura di Bali

23) Wawancara Nyoman Pudja Antara selaku bendesa adat Sukawati pada 11 Juli 2013 pukul 16.45 WITA.

dengan peraturan menggunakan adat *lelengisan*, sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan tidak tertulis. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dari beberapa warga banjar Dlodtangkaluk mengenai sejak kapan adanya ritual *mepeed* yang diikuti iring-iringan berdandan adat Bali *lelengisan*, hampir semua jawaban sama, *nak mule keto* (memang begitu dari dulu).

Masyarakat adat Sukawati terbiasa melakukan ritual keagamaan seperti *mepeed* berdasarkan tradisi yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, tanpa pernah mempertanyakan dengan kritis sejak kapan dan mengapa demikian? Jawaban *nak mule keto* seperti menjadi harga mati untuk membungkam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk mengkritisi perubahan. Eratnya hubungan antara adat, budaya dan agama Hindu membuat beberapa hal yang esensial menjadi sensitif untuk dipertanyakan. Terlebih dengan adanya wacana *ajeg Bali* yang turut meramaikan meriahnya ritual *mepeed* di desa adat pakraman Sukawati. Kegelisahan generasi tua seperti yang disampaikan oleh *Bendesa Sukawati*, bahwa *mepeed* kini sudah keluar dari *awig-awig*, sudah tidak taat pada aturan *lelengisan* namun banyak yang mengikuti gaya modifikasi dengan corak yang keluar dari aturan tidak tertulis yang telah disepakati.

*Ajeg Bali* sebagai sebuah wacana memberikan pengaruh yang besar dapat dilihat dari modifikasi yang digunakan dalam dandanan *mepeed* dengan gaya *lelengisan* yang lebih sederhana. Dengan semangat *ajeg Bali* sebagai wujud usaha untuk mengembalikan dan menjaga Bali, terkadang segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara adat menjadi diindah-indahkan. *Penjor* yang



**Figur 4.** Pakaian dengan gaya *lelengisan* pada tahun 1990an masih sederhana dan dianggap sebagai bentuk yang ideal untuk mengiringi dalam ritual *mepeed*. Sumber: dokumen Pribadi keluarga *bendesa* Sukawati.

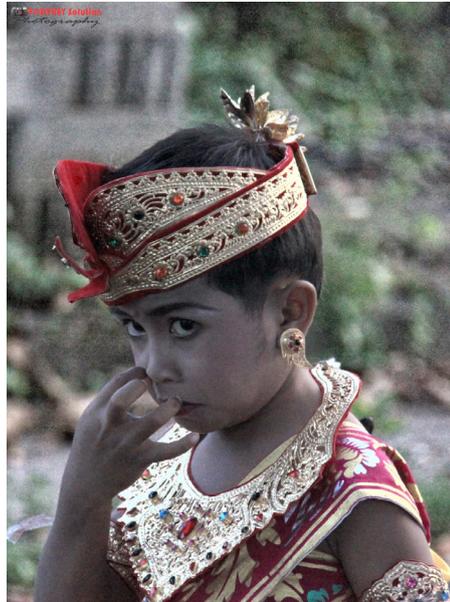


**Figur 5.** Pakaian dengan gaya modifikasi yang jauh dari gaya *lelengisan*, foto ini diambil pada Juni tahun 2013. Kebetulan penulis juga berada dalam *mepeed* yang sama namun tidak mengabadikan foto. Sumber: [sebelasphotografi.blogspot](http://sebelasphotografi.blogspot) diakses pada 12 September 2013 pukul 18.00 WIB.

biasanya terbuat dari daun janur muda yang hanya tahan beberapa hari saja, diganti dengan daun lontar agar lebih tahan lama. Tentu saja daun janur muda dipilih memiliki landasan filosofis tersendiri. Dalam beberapa hal pergeseran makna simbol-simbol keagamaan di Bali terjadi karena semangat *ajeg* Bali itu sendiri. Hal ini tentu saja menjadikan wacana yang menghegemoni membuat celah untuk melawannya, *ajeg* Bali muncul resistensinya sendiri.



**Figur 6.** Pakaian dengan gaya *lelengisan* pada tahun 1990an bagi pengiring anak-anak laki masih sederhana dan dianggap sebagai bentuk yang ideal untuk mengiring dalam ritual *mepeed*. Sumber: Dokumen Pribadi Keluarga Bendesa Sukawati.



**Figur 7.** Pakaian dengan gaya modifikasi yang jauh dari gaya *lelengisan*, foto ini diambil pada Juni tahun 2013. Sumber: sebelasphotografi. blogspot diakses pada 12 Agustus 2013 pukul 17.40 WIB.

### Wacana Tandingan: *Ajeg* Bali Merusak Bali

Pada Juli 2013, penulis berkesempatan mengunjungi Penggak Men Mersi yang terletak disebelah Puri Kesiman, Denpasar. Penggak Men Mersi merupakan NGO yang didirikan oleh Anak Agung Gede Ngurah Kusumawardhana dari Puri Kesiman. Penggak Men Mersi bergerak dalam pelestarian kebudayaan tidak hanya Bali namun juga Indonesia, dengan harapan kelak menjadi seperti museum yang independen dengan ribuan koleksi kebudayaan di Indonesia, Bali khususnya. Anak Agung Gede Ngurah Kusumawardhana atau yang biasa dipanggil Turah (Ratu Ngurah), mendirikan Penggak Men Mersi pada awal tahun 2010 karena menganggap kurangnya ruang publik di Bali.

*Penggak* merupakan istilah berasal dari bahasa Bali yang berarti tempat atau wadah untuk berdiskusi, menjadi ruang publik yang biasanya terletak di *banjar*. *Penggak* merupakan sebuah wadah informal yang biasa dipakai oleh masyarakat untuk berdiskusi dan melakukan kegiatan sebelum melaksanakan

rapat *banjar*. Biasanya dari diskusi di *penggak* inilah muncul ide-ide yang akan dibicarakan pada rapat *banjar*. Namun kini *penggak* cenderung menjadi posko untuk mencari dukungan politik dan kehilangan fungsi utamanya sebagai tempat berdiskusi memunculkan ide-ide yang berkaitan dengan kebudayaan<sup>24</sup>.

Dari wawancara dengan Ratu Ngurah, dapat disarikan bahwa tujuan didirikan Penggak Men Mersi adalah untuk menjadikan benteng pertahanan budaya Bali yang sekarang didominasi oleh budaya-budaya pasar yang berlebihan. Segala sesuatu diindah-indahkan dengan semangat *ajeg* Bali untuk kepentingan pasar pariwisata Bali. Dalam wawancara itu Ratu Ngurah mengatakan: “Perubahan itu pasti, tapi setidaknya kita bisa meminimalisir perubahan itu”<sup>25</sup>. Pada kesempatan yang sama beliau mengatakan bahwa istilah *ajeg* Bali itu sendiri masih sangat lunak, sedikit-sedikit bisa menyebut diri dengan semangat *ajeg* Bali, namun justru menjadikan Bali semakin keluar dari *awig-awig* atau aturan adat yang semestinya.

Dalam hal ini Ratu Ngurah sepertinya lupa bahwa Bali merupakan kontestasi dari konstruksi yang dibentuk warisan dari kolonisasi *Baliserring*, apa yang dianggap *awig-awig* belum tentu memang asli, bisa hanya hasil turunan dari apa yang dikonstruksikan atas Bali. Dari sinilah wacana *ajeg* Bali sebagai sebuah rezim kebenaran menghasilkan resistensinya sendiri (Haryatmoko, 2002). Penggak Men Mersi menjadi salah satu ruang publik yang mempertanyakan eksistensi *ajeg* Bali dengan kecurigaan justru “menjual” kebudayaan Bali kepada industri pariwisata. Lagi-lagi Bali menjadi ajang kontestasi dari konstruksi-konstruksi yang ingin membentuk citra Bali. Seperti yang dikatakan Robinson, apa yang dicitrakan terhadap Bali hingga kini bukanlah alami, namun hal itu merupakan artefak kebijakan kolonial Belanda. (Robinson, 2006).

## Kesimpulan

Pada awalnya *Ajeg* Bali harus dipahami sebagai sebuah usaha yang didesign oleh elit Bali untuk merumuskan ulang identitas ke-Bali-an masyarakat Bali. *Ajeg* Bali muncul sebagai akibat yang dihasilkan dari ketidakstabilan politik dan kebergantungan ekonomi masyarakat Bali pada pariwisata. Kebergantungan pada pariwisata itulah yang membawa Bali pada situasi yang dilematis dimana Bali harus menjaga “budaya” mereka agar tetap layak dengan tema pariwisata budaya yang sejak awal dibentuk di Bali. Disisi lain, dari pariwisata itu pula membawa akibat para bertemunya unsur budaya Bali dan budaya asing yang sedikit banyak memberikan perubahan dalam laku-hidup dan budaya masyarakat Bali. *Ajeg* Bali yang pada awalnya muncul atas

---

24) Wawancara dengan Kadek Wahyudita, budayawan di Penggak Men Mersi. 19 Juli 2013 pukul 11.10 WITA.

25) Wawancara dengan Anak Agung Gede Ngurah Kusumawardhana di Penggak Men Mersi. 20 Juli 2013 pukul 11.00 WITA.

landasan dasar politik, seiring berjalannya waktu justru menjadi wacana yang dibatinkan oleh sebagian besar masyarakat Bali dalam pelaksanaan ritual dan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini nampak pada ritual *mepeed* yang semakin hari semakin menunjukkan perubahan melalui memperindah segala upacara yang digunakan dengan semangat *Ajeg* Bali. Hal ini membawa konsekuensi logis pada munculnya wacana tandingan untuk mempertanyakan semangat *Ajeg* Bali itu sendiri yang justru muncul dari generasi muda dan tua yang kuatir Bali akan kehilangan identitas aslinya. Bali terlalu berat membawa beban dari apa yang telah dicitrakan kepadanya.

## Daftar Pustaka

### Sumber Primer

- “Balinezen wachten gelaten het Massatoerisme af”, *De Telegraaf*, 4 April 1970.
- “Schaduw van Massatoerisme hangt over eiland Bali”, *Nieuwsblad van het Noorden*, 17 December 1976.
- “Massatoerisme op Bali verwacht”, *De Telegraaf*, 8 September 1964.
- “Bali ‘natuur-monument’”, *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 23 Juli 1927.
- “Reizend Occasional”, *Soerabaijasch Handelsblad*, 22 Januari 1929.
- “Bali Toerisme”, *Soerabaijasch Handelsblad*. 1 Februari 1929.
- “Toerisme op Bali”, *De Telegraaf*, 21 Maart 1932.
- “Het Toerisme 1933 Geen Kwaad Figuur”, *Bataviaasch Nieuwsblad*, 18 Mei 1933.
- “Kerknieuws, Bali Rijp voor de Zending?”, *Algemeen Handelsblad*, 27 Mei 1932
- “Het Zending-Probleem op Bali” *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*. 23-09-1932
- “Het Zending-Probleem op Bali” *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*. 23-09-1932
- “Het Onderwijs op Bali Afbraak door den Jap”, *Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia*, 15 Mei 1946.
- “Het Onderwijs op Bali Afbraak door den Jap”, *Het dagblad : uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia*, 15 Mei 1946.

### Sumber Sekunder

- Adrian Vickers, *Bali: A Paradise Created*, (Penguin: Victoria, 1989).
- Achmad Sunjayadi, *Vereeniging toeristen verkeer Batavia (1908-1942): Awal Turisme Modern di Hindia Belanda*, Depok: FIB UI, 2007.
- Carol Warren, “Risk and Sacred: Environment, Media and Public Opinion in Bali”, *Oceania, Environmental Contest: Anthropological Perspectives*, Vol. 82. No. 3, November 2012.
- Degung Santikarma, “Bali Sebuah Dekonstruksi” *Nusa Tenggara*, 22 Oktober 1994.
- Degung Santikarma, “Ajeg Bali : Dari Gadis Cilik ke Made Schearzenegger” *Kompas*, 7 Desember 2003.
- Eka Ningtyas, “Dari Ekspatriat Barat Sampai Hippies: Pariwisata Bali 1920-1970an” *Tesis S2 Pascasarjana Ilmu Sejarah*, Universitas Gadjah Mada, 2016, hlm. 67-69
- Geoffrey Robinson, *The Dark Side of Paradise Political Violence in Bali*, Cornell University Press, 1995.
- Haryatmoko, “Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan, Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Michel Foucault” dalam *Basis* edisi Konfrontasi

- Foucault dan Marx, No. 01-02, tahun ke-51 Januari-Februari 2002.
- Henk Schulte Nordholt *ed*, *Renegotiating Boundaries Local Politics in Post-Suharto Indonesia*, (KITLV Press: Leiden, 2007).
- Henk Schulte Nordholt, *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas Dalam Sejarah Indonesia*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2002).
- Henk Schulte Nordholt, *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*, Brill: 2007.
- Nengah Bawa Atmaja, *Ajeg Bali Gerakan Identitas Kultural dan Globalisasi*, (LKIS: Yogyakarta, 2010)
- Ngurah Suryawan, *Kiri Bali Serpihan Esai Kajian Budaya*, (Puri Arsita: Yogyakarta, 2013).
- Ngurah Suryawan, "Ajeg Bali dan Lahirnya Jago-Jago Kebudayaan", *Kompas*, 7 Januari 2004
- Media Hindu, *Ajeg Bali Proteksi Agama, Budaya dan Tanah Bali*, edisi 21 November 2005.
- Michel Picard, *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2006.
- Richard Fox, "Om Sasty-Alaikum.... Interpreting Religio-Ethnic Humor on the Balinese Stage". *Archipel*, Volume 86, 2013, pp. 43-77
- Thomas Reuter, "Globalisation and Local Identities: The Rise of New Ethnic and Religious Movement in Post-Suharto Indonesia", *Asian Journal of Social Sciences*, Vol. 37. No. 6, 2009.